

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi

Hana Yusriani^{*}, Aminul Fajri²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

*Email: hanayusriani@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Government Accounting Standards, Government Internal Control Systems, and Human Resources Competence has a positive effect on the quality of the Regional Government Financial Reports (Case Study on OPD Tegal City). This research was conducted at the Regional Organization of Organizations (OPD) of Tegal City. The type of data used is primary data, with 72 respondents. Data collection method is done by questionnaire. While the data analysis method used is multiple linear regression. The results of this study indicate that, government accounting standards have a positive effect on the quality of local government financial statements with a significant value of $0.012 < 0.025$, the government's internal control system has a positive effect on the quality of local government financial statements with a significant value of $0,000 < 0.025$, and human resource competencies have a negative effect on the quality of local government financial statements with a significant value of $0.015 < 0.025$.

Keywords: *Government Accounting Standards, Government Internal Control Systems, Human Resources Competence, Local Government Financial Reports.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada OPD Kota Tegal). Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan $0,012 < 0,025$, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan $0,000 < 0,025$, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikan $0,015 < 0,025$.



Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pengelolaan keuangan disusun sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, efektif serta transparan merupakan kewajiban dari suatu entitas pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan ini, Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mengolah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Istikha dkk, 2014:1).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang masih belum optimal tentu sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi. Kompetensi tersebut mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung (Turwirdani, 2015:4).

Menurut Tribun Jateng. com, Tegal, fenomena yang terjadi sejak tahun 2013 sampai 2017 Kota Tegal selalu mendapat opini dari BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan baru tahun 2018 mendapat opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Dan pada tahun 2017 terungkapnya kasus korupsi atas pengadaan instalasi kesehatan di RSUD Kardinah Tegal yang melibatkan Walikota Tegal Siti Masitha Supono dengan menerima uang suap sebesar Rp

5.100.000.000. Adanya dugaan bahwa uang suap tersebut dipakai untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai walikota Tegal untuk periode 2019-2024. Ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan keuangan daerah di Pemerintahan Kota Tegal.

Fenomena tentang laporan keuangan pemerintah memang menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena ditemukan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Indriasih & koeswoyo,2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori Agency menurut Budi (2015) hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu disebut agen (Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan dan dituntut untuk melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai principalnya.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi pelaporan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu Relevan, Reliable/Andal, Dapat disbandingkan, Dapat dipahami (Kawatu, 2019).

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah aturan-aturan akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Salah satu manfaat atas penerapan SAP berbasis akrual yaitu dapat memberikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan. Indikator SAP adalah PSAP No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran-Berbasis Kas, PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP No. 4 tentang CALK, PSAP No. 5

tentang Akuntansi Persediaan, PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi, PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan, PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan , PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi , PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keunggulan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk keandalan informasi dimana keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau dapat dipercaya dengan diartikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Unsur SPIP adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Saputra (2015:7) Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan individu, suatu lembaga, atau suatu sistem untuk melaksanakan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan output dan outcome. Dalam Ahsana (2016:34) 3 aspek utama pembentukan kompetensi sdm adalah Pengetahuan, Keterampilan, dan Perilaku.

HIPOTESIS

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik sangat dipengaruhi oleh pemahaman basis akrual. SAP juga merupakan prinsip yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah digunakan sebelumnya sehingga informasi yang ada didalam laporan keuangan menjadi sangat akurat dan minimalisir kesalahan.

H1: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Lemahnya pengendalian internal menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. SPIP suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan SAP, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Semakin baik pengendalian intern suatu entitas tentu akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena segala sesuatunya dapat diawasi sehingga tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam hal kuantitas dan kualitas akan meningkatkan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi sangat berperan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar laporan yang dihasilkan berkualitas jika tidak memiliki kompetensi akuntansi maka akan berdampak pada ketidakakuratan kualitas laporan keuangan tersebut.

H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja di OPD Kota Tegal. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun

laporan keuangan pada OPD Kota Tegal. Dari setiap OPD akan diambil 2 responden dengan kriteria Staff Keuangan dan Bendahara. Kriteria ini didasarkan bahwa tiap-tiap pihak tersebut memiliki tanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrument yang menggunakan kuesioner kepada OPD.

METODE ANALISIS

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52) uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuisioner yang mrupakan indikator dari indikator dan varibael atau kontruk. Jika kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016:147) Statistik Deskriptif adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan F menggambarkan nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila sumsi ini dilanggar maka uji statistic akan menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji sttistik dapat dilakukan dengan uji statistk non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103) menyebutkan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang bagus sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi.

Persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:112) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dengan uji t:

1. Nilai signifikan < 0.025 maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai signifikan > 0.025 maka hipotesis di tolak. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi intinya mengukur berapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Berikut ini adalah uji validitas :

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Kode Item	Pearson Correlation	r Tabel	Keterangan
Kualitas	y1	0,500	0,2319	Valid



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	y2	0,605	0,2319	Valid
	y3	0,790	0,2319	Valid
	y4	0,738	0,2319	Valid
	y5	0,664	0,2319	Valid
	y6	0,836	0,2319	Valid
	y7	0,717	0,2319	Valid
	y8	0,695	0,2319	Valid
	y9	0,805	0,2319	Valid
	Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	x11	0,659	0,2319
x12		0,419	0,2319	Valid
x13		0,558	0,2319	Valid
x14		0,660	0,2319	Valid
x15		0,724	0,2319	Valid
x16		0,573	0,2319	Valid
x17		0,720	0,2319	Valid
x18		0,682	0,2319	Valid
x19		0,711	0,2319	Valid
x110		0,661	0,2319	Valid
x111		0,623	0,2319	Valid
x112		0,598	0,2319	Valid
x113		0,470	0,2319	Valid
x114		0,649	0,2319	Valid
x115		0,740	0,2319	Valid
x116		0,772	0,2319	Valid
x117		0,551	0,2319	Valid
x118		0,549	0,2319	Valid
x119		0,631	0,2319	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	x21	0,581	0,2319	Valid
	x22	0,805	0,2319	Valid
	x23	0,843	0,2319	Valid
	x24	0,808	0,2319	Valid
	x25	0,714	0,2319	Valid
	x26	0,643	0,2319	Valid
	x27	0,740	0,2319	Valid
	x28	0,747	0,2319	Valid
	x29	0,755	0,2319	Valid
	x210	0,786	0,2319	Valid
	x31	0,423	0,2319	Valid

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	x32	0,305	0,2319	Valid
	x33	0,332	0,2319	Valid
	x34	0,531	0,2319	Valid
	x35	0,447	0,2319	Valid
	x36	0,337	0,2319	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Hitung	Nilai Cronbach Alpha	Status
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,861	0,7	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,908	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,906	0,7	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,776	0,7	Reliabel

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	72	67	95	80.13	7.176
SPIP	72	35	50	42.85	4.408
SDM	72	18	25	21.17	1.343
Laporan Keuangan	72	33	45	39.24	3.721
Valid N (listwise)	72				

Tabel diatas menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 67, nilai maksimum sebesar 95, rata-rata sebesar 80,13, dan standar deviasi sebesar 7,176. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki nilai minimum sebesar 35, nilai maksimum sebesar 50, rata-rata sebesar 42,85, dan standar deviasi sebesar 4,408. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 21,17, dan standar deviasi sebesar 1,343. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar 45, rata-rata sebesar 39,24, dan standar deviasi sebesar 3,721.

Hasil Uji Normalitas

Jika $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal dan apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardize d Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.34987164
Most Extreme	Absolute	.068
Differences	Positive	.068
	Negative	-.063
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel diatas memperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	SAP	.550	1.818
	SPIP	.550	1.818
	SDM	.995	1.005

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan

Semua hasil variabel diatas diperoleh bahwa nilai toleran < 0,10 dan nilai VIF > 10 sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	19.545	5.625		3.474	.001
	SAP	.139	.054	.268	2.596	.012
	SPIP	.461	.087	.547	5.294	.000
	SDM	-.530	.213	-.191	-2.491	.015

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan

Pada Kolom *unstandardized coefficient* (B). Tertera nilai *constant* sebesar 19,545, koefisien Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,139, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 0,461, dan koefisien Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar -0,530. Dengan Demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 19,545 + 0,139X_1 + 0,461X_2 - 0,530X_3 + e$$

Persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- Nilai Konstanta sebesar 19,545 berarti bahwa tanpa adanya variabel, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 19,545
- Nilai koefisien dari Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,139, artinya jika variabel Standar Akuntansi Pemerintah naik satu satuan sementara variabel independen lainnya

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,139. pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- c. Nilai koefisien dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 0,461, artinya jika variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah naik satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,461. Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Nilai koefisien dari Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar -0,530, artinya jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia naik satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan sebesar 0,530. Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Statistik t

Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,025. Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi $< 0,025$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi $> 0,025$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

Tabel 7. Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.545	5.625		3.474	.001
	SAP	.139	.054	.268	2.596	.012
	SPIP	.461	.087	.547	5.294	.000
	SDM	-.530	.213	-.191	-2.491	.015

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil diatas maka :

- 1. Untuk hasil uji t diketahui variabel SAP memiliki nilai *Coefficients* β sebesar 0,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 Nilai $0,012 < 0,025$. Sementara t tabel dengan sig $\alpha = 0,025$ Maka

hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki *Coefficients* β sebesar 0,461 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai $0,000 < 0,025$. Maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki *Coefficients* β sebesar -0.530 dan nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,025$. Maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.775 ^a	.601	.584	2.401

a. Predictors: (Constant), SDM, SPIP, SAP

Didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,584 atau 58,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel SAP, SPIP, dan Kompetensi SDM sebesar 58,4% sedangkan sisanya sebesar 41,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dengan adanya standarisasi dalam menyusun laporan keuangan yang baik yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, maka laporan keuangan akan berkualitas dan

mudah dipahami oleh publik, dengan dibuktikannya pada penelitian ini nilai signifikansi $0,012 < 0,025$.

2. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal akan semakin baik. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian intern maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan dibuktikannya nilai signifikansi $0,000 < 0,025$.
3. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dibidang akuntansi sangat berperan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar laporan yang dihasilkan berkualitas dan akurat, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,025$.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal sebaiknya memperhatikan SDM tentang pelatihan-pelatihan yang bervariasi guna untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman para pegawai.
2. Pada penelitian ini untuk variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negative dimungkinkan adanya faktor-faktor penghambat lainnya seperti, kemampuan sebagian responden dalam mengimplementasikan ilmu akuntansi dalam dunia kerja. Untuk selanjutnya bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan orang-orang yang membuat laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat.
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna laporan dapat mengetahui secara jelas mengenai kualitas laporan keuangan.
4. Bagi Peneliti selanjutnya agar memperluas atau memperbanyak jumlah responden atau objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, M. T., & Gayatri. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 23. 2. 2018



- Ahsani, Irvan. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah). *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*
- Armando, G. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang. Maret 2013.*
- Aulia, A. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis AkruaL Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Tegal, September 2019.*
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kawatu, F, S. 2019 *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Jilid 1. Deepublish: Yogyakarta.
- Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. 2017. "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober, 643-670.*
- Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. M. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus, 1290-1318.*
- Perundang-undangan
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Republik Indonesia 2008. *Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*



Internet

<https://jateng.tribunnews.com/2018/05/31/lima-tahun-gagal-raih-opini-wtp-ini-kendala-yang-dialami-kota-tegal-sekarang>

BPK. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I. BPK RI. Online.

https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2019/I/ihps_i_2019_1568693769.pdf

(10 Januari 2020)